**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Laporan keuangan berkembang sangat cepat dalam era globalisasi, terutama dalam penyajian informasi. Laporan keuangan diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas tentang aktivitas suatu entitas ekonomi dalam satu periode akuntansi. Laporan keuangan yang menyajikan informasi sangat dibutuhkan berbagai pihak seperti pemerintah daerah sebagai aparat yang dipercaya oleh masyarakat dalam mengelola keuangan negara dan rakyat yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam mengelola keuangan negara dan rakyat yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam memberikan kepercayaan kepada pemerintah dalam mengelola keungan dengan sebaik-baiknya guna mencapai *Good Government Governance*, dicerminkan dengan adanya akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan.

Laporan keuangan pemerintah daerah dalam gambarannya mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Laporan keuangan juga merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Pentingnya laporan keuangan daerah terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun Undang-Undang yang mengatur mengenai pelaporan keuangan pemerintah sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 meliputi : (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (3) Neraca, (4) Laporan Operasional, (5) Laporan Arus Kas, dan (6) Laporan Perubahan Ekuitas, (7) Catatan atas Laporan Keuangan.

Fungsi laporan keuangan pemerintah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan selama periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran, kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundangan, posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman, perubahan posisi entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Oleh karena itu dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami dan kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Begitu juga di entittas pemerintah, untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang bekualitas dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan keuangan daerah bahkan organisional tentang pemerintahan (Roviyantie, 2011).

Laporan keuangan harus mempunyai nilai karena, informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi dapat mendukung pengambilan keputusan dan andal (Suwardjono, 2005). Laporan keuangan juga harus memiliki kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat yang disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (PP No.71 Tahun 2010) terdiri dari: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan dan (d) dapat dipahami.

Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, faktor yang menjadi dasar pertimbangan adalah kualitas sumber daya manusia dan penerapan tekhnologi sistem informasi. Disinilah peran aparatur sebagai sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang baik untuk mengelola keuangan daerah. (Tuasikal,2007).

Menurut Syafarudin (2008), Kualitas sumber daya manusia adalah sebagai kunci keuanggulan kompetitif bagi organisasi. Membentuk kompetensi-kompetensi dan komitmen pegawai baik secara individu atau kelompok guna memenuhi kebutuhan organisasi dan mengintegrasikan kompetensi-kompetensi tersebut dalam sistem manajemen yang dijalankan organisasi. Kualitas dan karakteristik pegawai yang diperlukan oleh organisasi pada hakikatnya tidak terlepas dari tantangan-tantangan bersaing yang akan dihadapi oleh organisasi sekarang maupun di masa yang akan datang.

Penerapan tekhnologi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) mencakup adanya (a) perangkat, (b) pengelolaan data keuangan, (c) perawatan (Jurnali dan Supomo dalam Indriasari, 2008).

Dalam penyusunan laporan keuangan dibutuhkan penerapan tekhnologi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang baik sehingga laporan keuangan dapat lebih akurat dan laporan keuangan dapat disajikan secara lengkap, serta penyusunan laporan keuangan menjadi lebih cepat. Penerapan SIMDA dapat dilihat dari segi kelemahan dalam pengelolaan data keuangan, kelemahan perangkat dan kelemahan dalam perawatan software SIMDA serta masalah kurangnya pemahaman user ataupun pengguna SIMDA terhadap siklus laporan keuangan pada software SIMDA.

Mahsun dan Sulistiyowati (2012:35) mengemukakan laporan keuangan pemerintah adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya yakni antara lain relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Agar laporan keuangan dapat dikategorikan berkualitas, maka dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah harus dilakukan oleh sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan dan keterampilan serta keahlian yang memadai dan di dukung oleh penerapan tekhnologi SIMDA agar dapat mempercepat dan memperakurat laporan keuangan pemerintah guna menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Fenomena yang sering muncul saat ini yaitu banyaknya pengguna sistem informasi baik itu pengguna internal maupun eksternal yang tidak puas dengan kinerja sistem informasi yang telah dikembangkan ataupun telah diterapkan oleh pemerintahaan tersebut, sehingga menimbulkan keluhan serta kerugian dikarenakan sistem informasi tersebut justru menghambat aktivitas operasional pengguna sistem informasi.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2014 kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Opini WTP yang diraih Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini merupakan yang keempat kalinya secara berturut-turut dalam empat tahun terakhir.

Pemerintah Kabupaten Bandung hanya mendapat predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2014 dari BPK RI Perwakilan provinsi Jawa Barat.

Sebagai sebuah lembaga yang berorientasi kepada publik atau masyarakat, pemerintah dituntut untuk menghasilkan laporan keuangan yang mengandung transparansi dan akuntabilitas. Fenomena lain juga ditemukan pada akuntabilitas dari laporan keuangan pemerintah. Dikutip dari [www.inilah.com](http://www.inilah.com) 15/10/2015 16:00 diketahui bahwa Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Harry Azhar Azis, mendorong pemerintah daerah meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan. Daerah yang laporan keuangannya mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) alias bisa dipertanggungjawabkan masih rendah. BPK telah melakukan pemeriksaan atas 504 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) atau sudah 93,51 persen diproses pada Semester I tahun 2015. Pada 2015, sebanyak 539 pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan.

Harry menjelaskan Beberapa pemerintah daerah yang nilainya C, hampir sekitar 5 persen dari sekitar 539 pemerintah daerah. Kira-kira masih ada 25 pemerintah daerah yang mendapatkan *disclaimer* (tidak menyatakan pendapat), dijelaskan bahwa seluruh laporan keuangan daerah mendapatkan WTP. Pada 2013, selain itu dijelaskan juga bahwa jumlah laporan keuangan yang mendapatkan WTP hanya 29,96 persen. Jumlah itu meningkat pada 2014 menjadi 49,80 persen dari 524 pemerintah daerah yang menyusun laporan.

Masalah yang sering ditemukan di daerah biasanya terkait aset, perjalanan dinas, dan bantuan sosial. Tiga masalah itu terkait keuangan di daerah. Ia pun mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pertanggungjawaban penggunaan keuangan daerah.

Pemimpin dan anggota BPK telah menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2015 kepada Presiden Joko Widodo. Laporan itu memuat hasil pemeriksaan atas 666 objek pemeriksaan yang memuat 607 audit keuangan, lima audit kinerja, dan 54 audit dengan tujuan tertentu.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal BPK Hendar Setiawan mengatakan, kendala keterbatasan tenaga akan dijawab dengan melibatkan auditor dari kantor akuntan publik. Hendar berkata bahwa BPK sudah mengajukan. Mulai tahun depan (tahun 2016) BPK menggunakan kantor akuntan publik.

Keterlibatan auditor swasta untuk membantu kerja pemeriksaan yang dilakukan BPK. Sejak 2015 hingga satu tahun mendatang Hendar menjelaskan bahwa BPK masih akan mendidik dan memantau kerja auditor swasta yang terbiasa melakukan audit keuangan publik, tidak mudah melepas begitu saja kerja-kerja auditor BPK yang tergolong rahasia ke auditor swasta. Harapan sebagian auditor BPK selama ini tersedot untuk audit keuangan bisa ditarik untuk audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Seperti diketahui, jumlah pegawai BPK saat ini sekitar 6.000 orang. Dari jumlah itu hanya 50-60 persen yang merupakan auditor.

Laporan hasil pemeriksaan BPK-RI Wilayah Banten Nomor : 15a/LHP/XVIII.SRG/05/2014-Tanggal 25 Mei 2015 terdapat beberapa temuan BPK-RI yang berpotensi adanya dugaan korupsi TA 2014 Pemda Provinsi Banten sebesar Rp.7.731.478.095.01. dan hasil analisa dari dokumen BPK-RI dan hasil LKPJ Tahun 2014 adalah sebesar Rp.921.130.599.811.65 atau hampir satu triliyun. Sejak berdirinya Pemda Provinsi Banten Tahun 2014 adalah hal yang sangat terburuk. Kondisi yang sangat buruk diduga didapati pada kondisi makro realisasi APBD Pemda Provinsi Banten Tahun 2014. (lenteranews.com)

Dengan fenomena di atas, dapat disimpulkan penerapan SIMDA ini dapat membantu peningkatan kualitas laporan keuangan, karena membantu dalam proses penyajian laporan keuangan yang efisien, tepat waktu, serta transparansi.

Berdasarkan penelitian yang di lakukan dapat di tarik kesimpulan bahwa penerapan SIMDA dapat membantu meningkatkan kualitas Laporan Keuangan, karena SIMDA Pada SKPD di Wilayah Kab. Bandung merupakan media yang sempurna untuk pengelolaan keuangan Daerah.

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hairul Mohammad (2014) dengan judul Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Penerapan Tekhnologi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah pada penelitian terlebih dahulu dilakukan di Pemerintah Kota Daerah Gorontalo sedangkan penulis meneliti di Pemerintah Daerah (SKPD di Wilayah Kab Bandung).

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

**“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”** (Suvey Pada SKPD di Wilayah Kab. Bandung).

**1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dan menjadi pokok permasalahan agar dalam pembahasan dapat mencapai sasaran, maka dalam penyusunannya membatasi masalah-masalah yang akan dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pada SKPD di Wilayah Kab. Bandung.
2. Bagaimana penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada SKPD di Wilayah Kab. Bandung.
3. Bagaimana kualitas laporan daerah pada SKPD di Wilayah Kab. Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya manusia (SDM) terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada SKPD di Wilayah Kab. Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada SKPD di Wilayah Kab. Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada SKPD di Wilayah Kab. Bandung secara simultan.

**1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kompetensi sumber daya manusia (SDM) pada SKPD di Wilayah Kab. Bandung.
2. Untuk menganalisis penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada SKPD di Wilayah Kab. Bandung.
3. Untuk menganalisis kualitas laporan keuangan daerah pada SKPD di Wilayah Kab. Bandung.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada SKPD di Wilayah Kab. Bandung.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada SKPD di Wilayah Kab. Bandung.
6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada SKPD di Wilayah Kab. Bandung secara simultan.

**1.4 Kegunaan penelitian**

**1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Kegunaan penelitian adalah untuk memperluas ilmu penelitian, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan ilmu untuk mendukung ilmu akuntansi khususnya pengaruh kualitas sistem informasi manajemen daerah terhadap kualitas lapran keuangan daerah.

**1.4.2 Kegunaan Praktis**

1. Kegunaan Bagi Penulis

Dapat menjelaskan mengapa faktor kualitas sumber daya, penerapan sistem informasi manajemen keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan dan dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kualitas sistem informasi manajemen daerah terhadap kualitas laporan keuangan.

Untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam dari teori yang telah diperoleh dengan kenyataan yang terjadi, dan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi.

1. Kegunaan bagi Intansi

Untuk memberikan sumbangan penelitian dalam menilai dan mengevaluasi sistem yang sedang berjalan dalam rangka menyempurnakan, mempertahankan, serta mengembangkan praktik-praktik yang dianggap telah memadai.

1. Kegunaan Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan referensi atau masukan untuk penelitian selanjutnya, khususnya mengenai topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

**1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Wilayah Kab. Bandung. Penulis melakukan penelitian pada bulan Oktober 2017 s.d selesai.